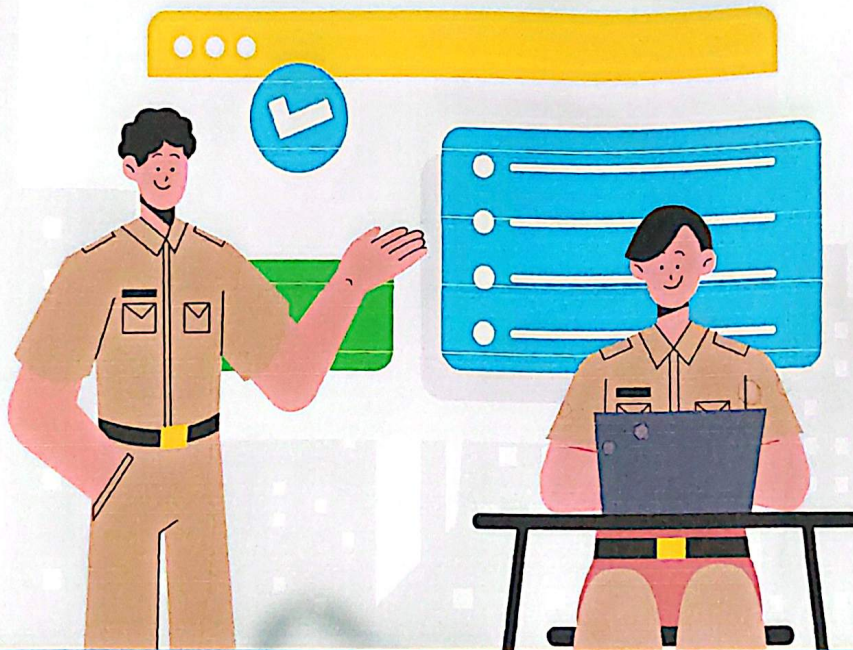


# RENCANA KERJA



● **TAHUN ANGGARAN 2026**



SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

☎ 0421.91858

📍 Jl. Jend. Sudirman No. 324 Pangkajene Sidrap

✉ Set\_dprdsidrap

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kami panjatkan, karena berkat rahmat dan HidayahNya sehingga Rencana Kerja Instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 dapat diselesaikan.

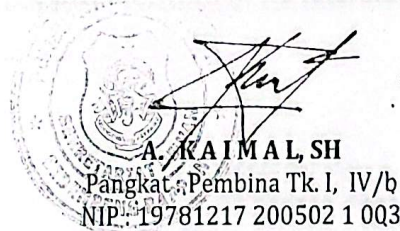
Penyajian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini pada prinsipnya merupakan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Pada Tahun 2026 untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja 2026 ini selanjutnya.

Akhirnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2026 kami persembahkan dengan segala Kerendahan hati. Semoga berguna dan mencapai tujuannya. Amin...

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2025

**Plt. SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP**

  
**A. KAIMAL, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. : 19781217 200502 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Landasan Hukum .....	2
I.3 Maksud dan Tujuan RENJA .....	4
I.4 Sistematika Penulisan RENJA .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis SKPD .....	8
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	25
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	27
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	29
II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	40
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
III.1 Telaah Terhadap Keijakan Nasional .....	41
III.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD .....	41
III.3 Program dan Kegiatan .....	42
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	44
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di tingkat kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Sekretariat DPRD bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional untuk memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Oleh karena itu, perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD harus mampu menjawab kebutuhan lembaga legislatif, serta berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Tahun 2026 merupakan tahun Kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029, sehingga Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 harus disusun dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta memperkuat strategi dalam mendukung pencapaian target RPJMD. Di samping itu, penyusunan Renja ini juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti dinamika kebijakan nasional, perubahan regulasi, kondisi sosial ekonomi daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja (RK) Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya untuk menyelaraskan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini juga sejalan dengan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, yang menekankan pentingnya perumusan

kebijakan berbasis data yang akurat dan relevan untuk mendukung visi pembangunan daerah serta visi Indonesia Emas 2045.

Penyusunan Rencana Kerja 2026 ini juga didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas DPRD, seperti penyusunan rancangan peraturan daerah, pengelolaan anggaran, serta pelayanan kepada masyarakat melalui penyerapan aspirasi rakyat. Hal ini sejalan dengan hasil reses anggota DPRD yang menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan daerah. Selain itu, tantangan global, regional, dan lokal, seperti perubahan iklim, dinamika sosial-ekonomi, dan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang transparan, menuntut Sekretariat DPRD untuk merumuskan rencana kerja yang adaptif dan inovatif.

Rencana Kerja 2026 ini juga mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang terukur dan terarah. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja 2026 bertujuan untuk memastikan bahwa Sekretariat DPRD dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, mendukung pembangunan daerah yang inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara optimal, serta mendukung terwujudnya kinerja lembaga DPRD yang lebih efektif, representatif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080)
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
  4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 19);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 435);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322)

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2026 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 58)

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja (RK) Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai pendukung operasional, administratif, dan teknis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat DPRD bertujuan untuk menyusun pedoman perencanaan yang sistematis dan terarah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal. Dokumen ini menjadi

acuan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan nasional, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **B. Tujuan**

1. Menyediakan dukungan administrasi, teknis, dan operasional yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam setiap kegiatan Sekretariat DPRD selama tahun anggaran 2026.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang terukur sebagai tolok ukur keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan amanah yang diberikan.
5. Memperkuat hubungan harmonis dan sinergis antara Sekretariat DPRD, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
6. Menjadi pedoman penyusunan RKA Tahun 2026, sebagai dasar perhitungan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD pada APBD Tahun Anggaran 2026.

#### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

## Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Sekretariat DPRD Tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen:

## Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD 2024-2026 Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Sekretariat DPRD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

### Bab III Tujuan, Sasaran

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Sekretariat DPRD

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Sekretariat DPRD Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Sekretariat DPRD.

### Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan Pendanaannya

### Bab V Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP TAHUN 2024**

**II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja dan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja meliputi 3 (tiga) hal yaitu, kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta monev hasil rencana program dan kegiatan. Dalam penyusunan Rencana Kerja 2026 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2024. Evaluasi Rencana Kerja 2024 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap RENSTRA, target kinerja, anggaran RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2024, yaitu :

**II.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Realisasi program/kegiatan di tahun 2024 yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan adalah :

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD  
Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  
Realisasinya hanya 50%, karena Keterlambatan Penyampaian Ranperda dari SKPD dan Kemampuan keuangan Daerah.

### **II.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari 2 Program yang dilaksanakan, sebagian besar programnya terlaksana. Yaitu :

- a. Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD terlaksana 62,73%
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana 95,24%

### **II.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Realisasi program/kegiatan di tahun 2024 tidak ada yang melebihi target kinerja. Semua program/kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan

### **II.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.**

Adapun Penyebab tidak tercapainya target kinerja di akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD  
Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Realisasinya hanya 50%, karena Keterlambatan Penyampaian Ranperda dari SKPD terkait dan Kemampuan keuangan Daerah.

### **II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya ketepatan pelayanan dalam memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD
3. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

### **II.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.**

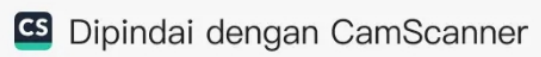
Dalam rangka efektifitas realisasi anggaran dalam pencapaian target kinerja sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan persentase Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat
2. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat-rapat yang lebih efektif

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2024 dijelaskan pada Tabel T-C29

Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Rappang OPD s/d Renja OPD Tahun-tahun (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1															
Meningkatkan fasilitas terhadap tugas dan fungsi DPRD			Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu (%)	100	27.983.024.091	0	0	100	15.595.827.000						
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Disahkan Menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD (%)	100,0	27.983.024.091	0,00	0	100,0	15.595.827.000	0,00	15.083.989,596				
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya (%)	100	1.993.544.000	0,00	0	100	520.606.000	0,00 %	434.235,386	50,00 %	434.235.386	50,00 %	
														21,78 %	



4.02.02.2.01.000.1	Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	3	3.13.930,000	0	0	1	153,137,000	1	80,632,200	1	80,632,200	33,33 %	25,68 %
4.02.02.2.01.000.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3	3	249,408,000	0	0	1	83,432,000	1	82,380,192	1	82,380,192	33,33 %	33,03 %
4.02.02.2.01.000.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	12	12	1,420,206,000	0	0	4	241,767,000	4	241,313,708	4	241,313,708	33,33 %	16,99 %
4.02.02.2.01.000.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1	1	10,000,000	0	0	1	42,270,000	1	29,909,286	1	29,909,286	100,00 %	299,09 %
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	651.000.000	0,00	0	100	184.650.000	0,00 %	148.403.660	33,33 %	148.403.660	33,33 %	22,80 %
4.02.02.2.02.000.1	Pembahasan KUA dan PPAS	3	3	58,500,000	0	0	1	19,500,000	1	19,155,800	1	19,155,800	33,33 %	32,74 %



2.03.000 1	Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Usulan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	50,127,000	0	0	1	15,059,000	1	13,231,000	1	13,231,000	33,33 %	26,39 %
4.02.02. 2.03.000 2	Pengawasan Usulan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usulan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	32,625,000	0	0	1	8,775,000	1	7,732,000	1	7,732,000	33,33 %	23,70 %
4.02.02. 2.03.000 3	Pengawasan Usulan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Usulan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	52,686,000	0	0	1	17,262,000	1	17,048,000	1	17,048,000	33,33 %	32,36 %
4.02.02. 2.03.000 4	Pengawasan Usulan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usulan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	32,625,000	0	0	1	33,085,000	1	32,631,000	1	32,631,000	33,33 %	100,02 %
4.02.02. 2.03.000 5	Pengawasan Usulan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usulan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	32,400,000	0	0	1	10,800,000	1	9,476,000	1	9,476,000	33,33 %	29,25 %

4.02.02.2.03.0006	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3	30,000,000	0	0	1	9,490,000	1	8,220,500	1	8,220,500	33,33 %	27,40 %
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan Anggaran	3	52,500,000	0	0	1	53,585,000	1	51,813,000	1	51,813,000	33,33 %	98,69 %
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3	160,248,000	0	0	1	32,916,000	1	28,836,000	1	28,836,000	33,33 %	17,99 %
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkatkan Kapasitasnya (%)	100	8,348,563,000	0,00	0	100	1,531,236,500	0,00 %	1,205,438,459	45,00 %	1,205,438,459	45,00 %	14,44 %
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	175,000,000	0	0	1	275,325,500	1	252,271,318	1	252,271,318	100,00 %	144,16 %
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12	2,100,000,000	0	0	4	1,000,000,000	3	720,000,000	3	720,000,000	25,00 %	34,29 %

4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3	112,485,000	0	0	1	17,490,000	1	8,252,141	1	8,252,141	33,33%	7,34%
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6	5,583,078,000	0	0	2	112,421,000	2	112,415,000	2	112,415,000	33,33%	2,01%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat (%)	100	5.713.712.000	0,00	0	100	2.238.200.000	0,00%	2.190.540.791	33,33%	2.190.540.791	33,33%	38,34%
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	36	941,894,000	0	0	12	103,700,000	12	103,287,800	12	103,287,800	33,33%	10,97%
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	315	45.000.000	0	0	105	10.385.000	105	8.518.000	105	8.518.000	33,33%	18,93%
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	9	4,726,818,000	0	0	3	2.124.115.000	3	2.078.734,991	3	2.078.734,991	33,33%	43,98%
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik yang difasilitasi (%)	100	10.000.000	0,00	0	100	8.945.000	0,00%	5.270.000	100,00%	5.270.000	100,00%	52,70%
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	10,000,000	0	0	1	8,945,000	1	5,270,000	1	5,270,000	100,00%	52,70%





4.02.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	17,220,000	0	0	1	5,740,000	1	1,796,700	1	1,796,700	33,33 %	10,43 %
4.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	8,489,083,894	0,00	0	100	2,333,268,200	0,00 %	2,290,389,958	33,33 %	2,290,389,958	33,33 %	26,98 %
4.02.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	8,445,673,894	0	0	28	2,217,323,200	28	2,177,159,958	28	2,177,159,958	33,33 %	25,78 %
4.02.01. 2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	24,000,000	0	0	12	109,475,000	12	107,330,000	12	107,330,000	33,33 %	447,21 %
4.02.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	6,000,000	0	0	1	2,000,000	1	1,919,000	1	1,919,000	33,33 %	31,98 %

4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	36	13,410,000	0	0	12	4,470,000	12	3,981,000	12	3,981,000	33,23 %	29,69 %
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	450,000,000	0,00	0	100	215,000,000	0,00 %	100,000,000	25,56 %	100,000,000	25,56 %	22,22 %
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90	450,000,000	0	0	30	215,000,000	23	100,000,000	23	100,000,000	25,56 %	22,22 %
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1,627,056,000	0,00	0	100	1,004,843,000	0,00 %	848,740,680	21,11 %	848,740,680	21,11 %	52,16 %
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36	171,162,000	0	0	12	61,434,000	12	60,279,000	12	60,279,000	33,33 %	35,22 %





4.02.01. 2.09.000 2	Penceliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78	673,440,000	0	0	26	204,044,000	26	180,198,850	26	180,198,850	33,33 %	26,76 %
4.02.01. 2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	804,336,000	0	0	4	378,390,000	4	375,989,463	4	375,989,463	33,33 %	46,75 %
4.02.01. 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	39.755.757.000	0,00	0	100	18.961.480.000	0,00 %	15.420.504.079	33,33 %	15.420.504.079	33,33 %	38,79 %
4.02.01. 2.15.000 1	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	105	38.464.257.000	0	0	35	17.149.980.000	35	13.649.519.079	35	#####	33,33 %	35,49 %
4.02.01. 2.15.000 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	15	682,500,000	0	0	5	1,601,500,000	5	1,571,485,000	5	1,571,485,000	33,33 %	230,25 %
4.02.01. 2.15.000 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	105	609,000,000	0	0	35	210,000,000	35	199,500,000	35	199,500,000	33,33 %	32,76 %
4.02.01. 2.16	Layanan Administrasi DPRD	100	3.312.000.000	0,00	0	100	1.036.500.000	0,00 %	609.563.118	29,17 %	609.563.118	29,17 %	18,40 %

2.16.000 3	Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36	0	0	12	106,500,000	12	81,556,518	12	81,556,518	33,23 %	18,12 %
4.02.01. 2.16.000 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	108	0	0	36	930,000,000	27	528,006,600	27	528,006,600	25,00 %	18,45 %

## II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

- a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja;

- Persentase Fasilitasi Rancangan Perda menjadi Perda Oleh DPRD.
- Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dapat dilihat pada Lampiran Tabel T-C.30.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PD : SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP**

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis	
			Tahun 2026	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2026	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2027		Tahun 2028
Persentase Rancangan menjadi Perda DPRD.			100	100	100	100	100	100	100			100	100	
Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	100	100	100	100	100			100	100	

### 11.3 Isu-isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga legislatif, Sekretariat DPRD menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026. Isu-isu ini diidentifikasi berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dinamika lingkungan strategis, serta kebutuhan untuk menyelaraskan program dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Berikut adalah isu-isu strategis yang menjadi fokus:

1. Optimalisasi Dukungan Administratif dan Teknis. Kapasitas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional bagi DPRD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyediaan data dan informasi yang akurat untuk mendukung penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) dan pengawasan kebijakan daerah. Keterbatasan sistem informasi yang terintegrasi menjadi tantangan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan.
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kompetensi aparatur Sekretariat DPRD perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks, seperti pengelolaan anggaran berbasis kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman terhadap regulasi terbaru. Pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi isu krusial untuk memastikan kualitas pelayanan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi. Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Kurangnya penerapan sistem digital dalam pengelolaan dokumen, pelaporan, dan komunikasi dengan masyarakat menghambat efektivitas kerja Sekretariat DPRD.
4. Peningkatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Dalam mendukung fungsi DPRD, Sekretariat perlu memperkuat mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, konsultasi publik, dan sosialisasi peraturan daerah. Isu ini menjadi strategis untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan DPRD responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Tantangan Tata Kelola Keuangan dan Aset. Pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat DPRD harus mematuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Isu ini mencakup perlunya peningkatan pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan serta optimalisasi penggunaan anggaran.
6. Adaptasi terhadap Dinamika Sosial-Ekonomi dan Lingkungan. Perubahan iklim, fluktuasi ekonomi, dan dinamika sosial masyarakat menuntut Sekretariat DPRD untuk mendukung DPRD dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Hal ini mencakup isu-isu seperti ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Koordinasi dengan Perangkat Daerah Lain. Lemahnya koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD menjadi isu strategis yang perlu diatasi. Sinergi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan keselarasan program Sekretariat DPRD dengan prioritas pembangunan daerah.

Isu-isu strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, dengan tujuan memastikan Sekretariat DPRD dapat menjalankan tugasnya secara efektif, mendukung DPRD dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, serta berkontribusi pada pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

### **II.3.2. Isu-isu penting dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan**

Isu-isu penting dan catatan strategis yang terkait dengan dinamika lingkungan serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun kedepan adalah :

#### 1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

#### 2. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan sinersitas kelembagaan di daerah.

#### 3. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

#### II.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2026, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada renja tahun 2026 . Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/ kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan. Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2026 ditunjukkan oleh Tabel 3. Setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh program/ kegiatan yang

direncanakan pada renja tahun 2026 beserta besarnya telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat.

- 1) Rancangan kerangka ekonomi Daerah
- 2) Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 3) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana kerja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk lebih jelasnya mengenai Review rancangan awal RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada Lampiran tabel T-C.31.





1	Pengawasan Urusan Kesejahteraan Rakyat	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Kesejahteraan Rakyat	1	17,262,000	Pengawasan Urusan Kesejahteraan Rakyat	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Kesejahteraan Rakyat	1	17,262,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	1	10,000,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	1	10,000,000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	7,500,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	7,500,000
	Pengawasan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	10,000,000	Pengawasan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	10,000,000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Penggunaan Anggaran	1	13,936,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Penggunaan Anggaran	1	13,936,000
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	32,916,000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pangkajene	Jumlah Laporan hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	32,916,000
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya	100	999,563,000	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya	100	999,563,000
	Pendalaman Tugas DPRD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	700,000,000	Pendalaman Tugas DPRD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4	700,000,000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pangkajene	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2	114,073,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pangkajene	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2	114,073,000

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pangkajene	Jumlah Tenaga ahli Fraksi	7	168,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pangkajene	Jumlah Tenaga ahli Fraksi	7	168,000,000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	17,490,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	17,490,000
Penyerapan dan Penghimpunan Asprasi Masyarakat	Pangkajene	Persentase penyerapan dan penghimpunan asprasi masyarakat	100	130,000,000	Penyerapan dan Penghimpunan Asprasi Masyarakat	Pangkajene	Persentase penyerapan dan penghimpunan asprasi masyarakat	100	130,000,000
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Pangkajene	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	100,000,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Pangkajene	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	100,000,000
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	105	-	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	105	-
Pelaksanaan Reses	Pangkajene	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	1	30,000,000	Pelaksanaan Reses	Pangkajene	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	1	30,000,000
Facilitasi Tugas DPRD	Pangkajene	Persentase Facilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	100	5,321,562,000	Facilitasi Tugas DPRD	Pangkajene	Persentase Facilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	100	5,321,562,000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pangkajene	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	12	5,321,562,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pangkajene	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	12	5,321,562,000
XXX PROGRAM PEMERINTAHAN PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	23,864,374,000	XXX PROGRAM PEMERINTAHAN PENUNJANG URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	23,864,374,000
XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	21,621,000	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	21,621,000

XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10.000.000	10.000.000	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10.000.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.827.000	2.827.000	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.827.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPPD	1	2.734.000	2.734.000	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPPD	1	2.734.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.600.000	1.600.000	1	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.600.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPPD	1	2.268.000	2.268.000	1	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPPD	1	2.268.000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2.192.000	2.192.000	1	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2.192.000
XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.418.963.240	2.418.963.240	100	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.418.963.240
XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28	2.406.425.240	2.406.425.240	28	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28	2.406.425.240

XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	6,462,000	XXX Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkajene	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	6,462,000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1	2,500,000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1	2,500,000
XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	3,576,000	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	3,576,000
XXX Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		80,000,000	XXX Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		80,000,000
XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkajene	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	80,000,000	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pangkajene	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	80,000,000
XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		529,766,000	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		529,766,000
XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkajene	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	61,434,000	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pangkajene	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	61,434,000
XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	72,000,000	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	72,000,000
XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pangkajene	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	25,000,000	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pangkajene	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12	25,000,000

XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pangkajene	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	51.332.000	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pangkajene	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	51.332.000
XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Pangkajene	Jumlah laporan kunjungan tamu	12	230.000.000	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Pangkajene	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	12	230.000.000
XXX Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30	90.000.000	XXX Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pangkajene	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	30	90.000.000
XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100	90.000.000	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100	90.000.000
XXX Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	20.000.000	XXX Pengadaan Mebel		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	20.000.000
XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		50.000.000	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		50.000.000
XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	20.000.000	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	20.000.000
XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah		1.343.210.000	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah		1.343.210.000
XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	36.000.000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	36.000.000
XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	481.320.000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangkajene	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	481.320.000
XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	75.890.000	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pangkajene	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	75.890.000

XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	750,000,000	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pangkajene	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	750,000,000
XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	709,676,000	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	709,676,000
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26	35,000,000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pangkajene	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26	35,000,000
XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	26	274,676,000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pangkajene	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	26	274,676,000
XXX Pemeliharaan Mebel	Pangkajene	Jumlah Mebel yang dipelihara	1	25,000,000	XXX Pemeliharaan Mebel	Pangkajene		1	25,000,000
XXX Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pangkajene	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	50	25,000,000	XXX Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pangkajene		50	25,000,000
XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	350,000,000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pangkajene	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	350,000,000
XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pangkajene	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	17,654,887,760	XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pangkajene	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	17,654,887,760
XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pangkajene	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	35	17,017,887,760	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pangkajene	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	35	17,017,887,760
XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pangkajene	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	5	427,000,000	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pangkajene	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	5	427,000,000

KXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pengguna	Jumlah orang yang mengikuti medical check Up DPRD	210.000,000	KXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pengguna	Jumlah orang yang mengikuti medical check Up DPRD	210.000,000
KXX Layanan Administrasi DPRD	Pengguna	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	1.016.250,000	KXX Layanan Administrasi DPRD	Pengguna	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	1.016.250,000
KXX Fasilitas Ruang Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pengguna	Jumlah layanan hasil Fasilitas Ruang Koordinasi dan Konsultasi DPRD	88.250,000	KXX Fasilitas Ruang Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pengguna	Jumlah layanan hasil Fasilitas Ruang Koordinasi dan Konsultasi DPRD	88.250,000
KXX Pelayanan Rumah Tangga DPRD	Pengguna	Jumlah paket Keburnihai Rumah Tangga DPRD yang disediakan	930.000,000	KXX Pelayanan Rumah Tangga DPRD	Pengguna	Jumlah paket Keburnihai Rumah Tangga DPRD yang disediakan	930.000,000

## 11.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menerima langsung usulan program dan kegiatan masyarakat karena Tugas pokok dan Fungsinya tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara langsung maupun usulan masyarakat dalam kegiatan Reses DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Sidenreng Rappang.

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	<b>NIHIL</b>		<b>NIHIL</b>		

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan Misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan Gow Governance dan Akuntabilitas Publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Digitalisasi, Memprioritaskan pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dokumen dan pelayanan publik, sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
2. Penguatan Kapasitas SDM, Meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan untuk aparatur dan anggota DPRD, dengan memanfaatkan dukungan program nasional seperti bimbingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri.
3. Peningkatan Transparansi, Mempublikasikan laporan kinerja dan anggaran secara berkala melalui platform digital untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.
4. Optimalisasi Koordinasi, Perkuatan forum koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan sinkronisasi program dengan RPJMD dan kebijakan nasional.
5. Pemantauan dan Evaluasi, Menetapkan indikator kinerja yang spesifik dan terukur untuk memantau keselarasan dengan kebijakan nasional, serta lakukan evaluasi triwulanan untuk menyesuaikan dinamika kebijakan.

#### III. 2. Tujuan dan Sasaran Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidrap

- 1) Dengan berlandaskan Renstra Tahun 2024 - 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kapasitas Kinerja DPRD"
- 2) Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capalannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi

### **III.3. Program dan kegiatan**

III.3.1 Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk menjalankan misi yang dilakukan oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang; maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaa Tugas dan Fungsi DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### **III.3.2 Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan, berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaa Tugas dan Fungsi DPRD
  - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Peningkatan Kapasitas DPRD
  - Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi masyarakat
  - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - Fasilitasi Tugas DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan
  - Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Layanan administrasi DPRD

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran memiliki 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 Kegiatan dengan 27 Sub Kegiatan dan Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota terdiri dari 7 Kegiatan dengan 24 Sub Kegiatan Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.33  
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan /SubKegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
	SEKRETARIAT DPRD				31,000,140,000			31,970,934,000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				7,135,766,000		100	7,644,842,000
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi. Pembahasannya	Pangkajene	100	374,875,500		100	374,875,500
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pangkajene	1	100,000,000	APBD	1	100000000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pangkajene	1	74,875,500	APBD	1	74875500
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Pangkajene	4	200,000,000	APBD	4	200000000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana		100	149,451,500		100	158,427,000
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pangkajene	1	19,500,000	APBD	1	19,500,000

4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Pangkajene	1	19,500,000	APBD	1	19,500,000
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pangkajene	1	32,000,000	APBD	1	32,000,000
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pangkajene	1	37,927,000	APBD	1	37,927,000
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan Laporan Semester yang terlaksana	Pangkajene	1	5,000,000	APBD	1	5,000,000
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pangkajene	1	35,524,500	APBD	1	44,500,000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana		100	160,314,000		100	160,314,000
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pangkajene	1	60,000,000	APBD	1	60,000,000
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pangkajene	1	8,700,000	APBD	1	8,700,000
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pangkajene	1	17,262,000	APBD	1	17,262,000

4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pangkajene	1	10,000,000	APBD	1	10,000,000
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pangkajene	1	7,500,000	APBD	1	7,500,000
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pangkajene	1	10,000,000	APBD	1	10,000,000
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pangkajene	1	13,936,000	APBD	1	13,936,000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pangkajene	1	32,916,000	APBD	1	32,916,000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkatkan Kapasitasnya		100	999,563,000		100	1,099,563,000
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pangkajene	6	700,000,000	APBD	6	800,000,000
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pangkajene	2	114,073,000	APBD	2	114,073,000
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga ahli Fraksi	Pangkajene	7	168,000,000	APBD	7	168,000,000
4.02.02.2.04.04	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Pangkajene	1	17,490,000	APBD	1	17,490,000

4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat	100	130,000,000	100	130,000,000
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	100,000,000	12	100,000,000
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	3	30,000,000	3	30,000,000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana	100	5,321,562,000	100	5,721,662,500
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	24	5,321,562,000	24	5,721,662,500
..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Nilai SAKIP	65	23,864,374,000	65	24,326,092,000
..01.2.01	XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	21,621,000	100	21,621,000
..01.2.01.01	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10,000,000	1	10,000,000
..01.2.01.02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2,827,000	1	2,827,000
..01.2.01.03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2,734,000	1	2,734,000

..01.2.01.04	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene	1	1,600,000	APBD	1	1,600,000
..01.2.01.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangkajene	1	2,268,000	APBD	1	2,268,000
..01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene	1	2,192,000	APBD	1	2,192,000
..01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	2,418,963,240		100	2,508,391,000
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Pangkajene	28	2,406,425,240	APBD	28	2,495,853,000
..01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkajene	12	6,462,000	APBD	12	6,462,000
..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Pangkajene	1	2,500,000	APBD	1	2,500,000
..01.2.02.07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene	12	3,576,000	APBD	12	3,576,000

..01.2.03	XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pangkajene	30	80,000,000	80,000,000			80,000,000
..01.2.03.01	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	30	80,000,000	80,000,000			80,000,000
..01.2.05	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			529,766,000	519,766,000			519,766,000
..01.2.05.10	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pangkajene	12	61,434,000	61,434,000			61,434,000
..01.2.05.11	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pangkajene	12	72,000,000	42,000,000	APBD	30	42,000,000
..01.2.06	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		12	25,000,000	25,000,000			25,000,000
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pangkajene	12	51,332,000	51,332,000	APBD	12	51,332,000
..01.2.06.02	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas kunjungan tamu	Pangkajene	12	230,000,000	250,000,000	APBD	12	250,000,000
..01.2.06.03	XXX Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pangkajene	30	90,000,000	90,000,000	APBD	12	90,000,000
..01.2.06.05	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pangkajene	100	90,000,000	90,000,000	APBD	12	90,000,000

..01.2.06.08	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	Pangkajene	1	20.000.000	APBD	12	20.000.000
..01.2.07	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pangkajene	2	50.000.000		100	50.000.000
..01.2.07.06	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pangkajene	3	20.000.000	APBD	35	20.000.000
..01.2.07.07	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene		1.343.210.000			1.344.134.000
..01.2.07.08	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Pangkajene	12	36.000.000	APBD	12	36.000.000
..01.2.07.09	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Pangkajene	36	481.320.000		36	481.320.000
..01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12	75.890.000		12	75.890.000
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Pangkajene	12	750.000.000	APBD	12	750.924.000
..01.2.08.02	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangkajene	100	709.676.000	APBD	36	709.676.000
..01.2.08.03	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Pangkajene	26	35.000.000	APBD	12	35.000.000

..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan XXX Pemeliharaan Mebel	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah mebel yang dipelihara/direhabilitasi	Pangkajene	26	274.676.000	APBD	12	274.676.000
..01.2.09			Pangkajene	1	25.000.000		100	25.000.000
..01.2.09.01	XXX Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pangkajene	50	25.000.000	APBD	26	25.000.000
..01.2.09.02	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pangkajene	4	350.000.000	APBD	26	350.000.000
	XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pangkajene	100	17.654.887,760	APBD	100	18.036.254.000
..01.2.09.09	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Pangkajene	35	17.017.887,760		35	17.399.254.000
..01.2.09.10	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Pangkajene	5	427.000.000		5	427.000.000
..01.2.15	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	Pangkajene	35	210.000.000		35	210.000.000
..01.2.15.01	XXX Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD	Pangkajene		1.016.250.000	APBD	35	1.016.250.000
..01.2.15.02	XXX Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitas Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Pangkajene	12	86.250.000	APBD	5	86.250.000
..01.2.15.03	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah-Tangga DPRD yang disediakan	Pangkajene	36	930.000.000	APBD	35	930.000.000

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 merupakan dasar dan acuan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.

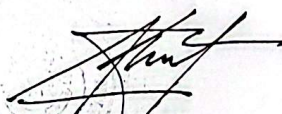
Penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan pedoman menuju kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan kegiatan tahun 2026 yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkualitas, partisipatif, mandiri dan sejahtera.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026. Mudah-mudahan dapat menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mohon masukan untuk perbaikan penyusunan Rencana Kerja ini, seandainya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 yang disusun ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan Renja tahun berikutnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng Rappang, Agustus 2025  
**Pt. SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP**



**A. KAIMAL, SH**  
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b  
NIP : 19781217 200502 1 003